



## Pemkot Yogya Belum Rumuskan Parkir Elektronik

**YOGYA, TRIBUN** - Rencana Pemerintah Kota Yogyakarta yang berniat menggulirkan smart parking atau sistem perparkiran berbasis elektronik, langsung disambut penyedia jasa layanan. Walau kebijakan belum diputuskan, namun pemerintah mengaku kebanjiran pihak ketiga memberikan penawaran pengadaan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Wirawan Haryo Yudo membenarkan hal tersebut. Ia menuturkan, ada tiga perusahaan penyedia parkir yang langsung

mengajukan penawaran penyedia layanan smart parking. "Memang benar ada tiga perusahaan yang sudah menawarkan ke kita," ujar Wirawan.

Namun hingga saat ini, menurut Wirawan. Pemkot belum memberikan jawaban terhadap penawaran tersebut. Pasalnya, kebijakan parkir berbasis elektronik belum diterapkan dan alokasi anggarannya belum diusulkan dalam RAPBD 2018. "Selain itu regulasi terkait perparkiran kan masih dalam pembahasan di

dewan," ungkapnya.

Dia menjelaskan, penerapan parkir berbasis elektronik harus didahului dengan studi kebutuhan per wilayah. Sehingga Pemkot Yogyakarta bisa memetakan wilayah yang membutuhkan mesin parkir elektronik.

"Termasuk juga teknisnya seperti apa kan masih perlu dirumuskan. Tapi untuk jangka panjang, sistem smart parking akan menjadi kebutuhan daerah, apalagi Kota Yogyakarta ini cukup kecil tapi aktivitas masyarakat sangat tinggi," tuturnya.

Wirawan menjelaskan, sistem smart parking dilengkapi dengan mesin elektrik. Setiap pengendara tidak perlu membayar retribusi dengan uang tunai melainkan menggunakan kartu elektrik.

Kebijakan smart parking ini sempat muncul dalam rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY atas penyelenggaraan perparkiran di Kota Yogyakarta. ORI DIY memberikan rekomendasi kepada kepala daerah agar mulai mengkaji penggunaan smart parking untuk menekan celah kebo-

coran retribusi dan mengedepankan aspek transparansi retribusi.

### Tak Perlu Khawatir

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta menilai sistem smart parking mencegah tindakan korupsi dan membuat juru parkir (jukir) kembali kepada tugas pokoknya.

Pimpinan Komisi D DPRD Kota Yogyakarta Antonius Fokki Ardianto mengatakan, sistem smart parking dengan mesin parkir elektronik mendukung kinerja jukir.

"Selama ini masyarakat kan

mengeluhkan karcis yang ternyata dipakai berulang-ulang dan kadang harganya tidak sesuai aturan," ujar Fokki pada Rabu (13/7) lalu.

Fokki menyebut, sistem smart parking akan mengembalikan tugas pokok dan instruksi (tupoksi) bagi jukir, yakni menata kendaraan. Jukir pun akan digaji melalui APBD yang saat ini masih tengah dalam pembahasan.

"Besaran gaji tentu tidak sama antar kawasan, tapi harus dikaji oleh Bappeda atau Dinas Perhubungan," jelasnya. (gll)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005